

MANAJEMEN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Umi Nurhayati

Nurul Anam

Email: uminurhayati@gmail.com

Abstrak

Matakuliah Pendidikan Antikorupsi ini tidak berlandaskan pada salah satu perspektif keilmuan secara khusus. Berlandaskan pada fenomena permasalahan serta pendekatan budaya yang telah diuraikan diatas, matakuliah ini lebih menekankan pada pembangunan karakter antikorupsi (*anti-corruption character building*) pada diri individu mahasiswa. Supaya matakuliah pendidikan antikorupsi berjalan dengan baik, maka dibutuhkan suatu manajemen pembelajaran. Menurut Terry, manajemen adalah proses, yakni aktifitas yang terdiri dari empat subyektivitas yang masing-masing merupakan fundamental. Keempat subyektivitas itu- yang ada dalam dunia manajemen dikenal sebagai P.O.A.C adalah *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), *controlling* (pengawasan). Oleh karena itu, implementasi manajemen pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi sangat berkaitan dengan empat unsur manajemen tersebut. Berpijak dari konsep manajemen dan pembelajaran, maka konsep manajemen pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi dapat diartikan proses mengelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian (pengarahan) dan pengevaluasian kegiatan yang berkaitan dengan proses membelajarkan si pebelajar dengan mengikutsertakan berbagai faktor di dalamnya guna mencapai tujuan matakuliah pendidikan antikorupsi. Dalam “memanaje” atau mengelola pembelajaran, manajer dalam hal ini dosen melaksanakan berbagai langkah kegiatan mulai dari merencanakan pembelajaran, mengorganisasikan pembelajaran, mengarahkan dan mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan. Pengertian manajemen pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi dapat diartikan secara luas dalam arti mencakup keseluruhan kegiatan bagaimana membelajarkan mahasiswa mulai dari perencanaan pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi sampai pada penilaian pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi

Key Word: Manajemen, Pembelajaran, Pendidikan Antikorupsi

A. Pendahuluan

Pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya mampu memberi dampak bagi pembentukan karakter masyarakat Indonesia termasuk juga karakter antikorupsi. Ini dibuktikan dengan publikasi Tempo (11 Juli 2013) tentang hasil survey yang dirilis oleh Lembaga Transparency Internasional Indonesia (TII), Indonesia berada di empat negara terbawah dalam urutan tingkat korupsi dan semakin memburuk disbanding survey dua tahun lalu, yaitu menempati urutan 111 dalam urutan negara terkorup dan Indonesia berada di bawah Thailand (urutan 88) dan

Filipina (urutan 108). Sedangkan tiga negara di bawah Indonesia antara lain Vietnam, Laos dan Myanmar.¹

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah merumuskan dan melaksanakan pendidikan antikorupsi di lembaga pendidikan. Menurut Faisal Djabbar², ide memasukkan materi antikorupsi dalam kurikulum lembaga pendidikan seperti lembaga pendidikan dan perdosenan tinggi mendapat respon positif masyarakat. Hasil jajak pendapat harian “Seputar Indonesia” tanggal 27 Mei 2011 terhadap 400 responden, sebanyak 87% menyatakan perlunya memasukkan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum. Keyakinan masyarakat juga relatif besar, hampir 200 responden menyatakan keyakinannya bahwa pendidikan antikorupsi bisa berjalan efektif membendung perilaku korupsi di Indonesia.

Pelaksanaan pendidikan antikorupsi di lembaga pendidikan tidak hanya di lembaga lembaga pendidikan, tapi juga di perguruan tinggi. mahasiswa diharapkan mampu mencegah dirinya sendiri dan orang lain untuk tidak melakukan tindak korupsi, dan juga mampu mendeteksi indikasi adanya tindak korupsi di sekitar mereka. Dalam hal ini mahasiswa memiliki kompetensi individual yang bermula dari kepemilikan tanggapan negatif mengenai korupsi dan tanggapan positif terhadap antikorupsi serta menguatnya kesadaran mahasiswa akan adanya potensi tindak korupsi dan yang pada akhirnya memiliki sikap antikorupsi. Sikap antikorupsi ini dimungkinkan untuk mempengaruhi lingkungan sekitar di mana mahasiswa berani melakukan pencegahan terhadap orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dalam bentuk apapun.³

Supaya proses pembelajaran berjalan dengan baik, maka salah satunya dibutuhkan suatu manajemen pembelajaran yang baik dan efektif. Manajemen pembelajaran itu dalam matakuliah pendidikan antikorupsi sangat penting, karena manajemen pembelajaran mempunyai tujuan-tujuan tertentu dan bersifat tidak berwujud (*intangibile*). Usahanya ialah mencapai hasil-hasil yang spesifik, biasanya dinyatakan dalam bentuk sasaran-sasaran. Manajemen pembelajaran dapat dinyatakan sebagai tidak berwujud (*intangibile*), karena tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan hasilnya, yakni output pekerjaan yang cukup, ada kepuasan pribadi, produk dan servisnya lebih baik.⁴

B. Pembahasan

1. Manajemen Pembelajaran

a. Pengertian Manajemen Pembelajaran

Secara etomologis, kata manajemen (*management*) berarti, pimpinan, direksi dan pendosens, yang diambil dari kata kerja “manage” dalam bahasa

¹ Nurul Anam, *Pendidikan Anti Korupsi di Pesantren: Konsep Nilai dan Desain Pembelajaran*, (Bandung: Program Pascasarjana UIN Sunang Gunung Djati Bandung dan Akademi Pengajaran Islam Universiti Malaya (APIUM), 2013), 261.

² Muhamad Nurdin, *Pendidikan Antikorupsi: Strategi Internalisasi Nilai-nilai Islami dalam Menumbuhkan Kesadaran Antikorupsi di Sekolah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 33.

³ Kementerian Agama, *Pedoman Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2013*, (Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2013), 3-4.

⁴ George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 9.

perancis berarti tindakan membimbing atau memimpin. Sedangkan dalam bahasa latin, management berasal dari kata “*managiere*” terdiri dari dua kata yaitu manus dan agere. *Manus* Berarti tangan dan “*agere*” berarti melakukan atau melaksanakan.⁵

Plunket dkk.⁶ mendefinisikan manajemen sebagai “*One or more managers individually and collectively setting and achieving goals by exercising related functions(planning organizing staffing leading and controlling) and coordinating various resources(information materials money and people)*”. Pendapat tersebut kurang lebih mempunyai arti bahwa manajemen merupakan satu atau lebih manajer yang secara individu maupun bersama-sama menyusun dan mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi-fungsi terkait (perencanaan pengorganisasian penyusunan staf pengarahan dan pengawasan) dan mengkoordinasi berbagai sumber daya (informasi material uang dan orang). Manajer sendiri menurut Plunket dkk. merupakan *people who are allocate and oversee the use of resources*: orang yang mengatur dan mengawasi penggunaan sumber daya.

Sedangkan Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.⁷

Sedangkan pembelajaran secara etimologis berasal dari kata “*instruction*” atau disebut juga kegiatan intruksional (*instructional activities*) adalah usaha mengelola lingkungan dengan sengaja agar seseorang belajar berperilaku tertentu dalam kondisi tertentu. Kata “*instruction*” mempunyai pengertian yang lebih luas daripada pengajaran (*teaching*). Jika kata pengajaran ada dalam konteks dosen-murid di kelas formal ;pembelajaran (*instruction*) mencakup pula kegiatan belajar mengajar yang tidak mesti-dihadiri dosen secara fisik. Oleh karena itu dalam *instruction* yang di tekankan adalah proses belajar, maka usaha-usaha terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri siswa disebut pembelajaran.⁸

Pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa-siswa belajar. Pembelajaran juga diartikan sebagai sebuah proses perubahan tingkah laku atau sikap yang disebabkan oleh pengalaman. Belajar menurut Gagne dalam Dahar (1989) dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Belajar pada hakekatnya adalah suatu aktivitas yang mengharapkan perubahan tingkah laku pada diri individu yang sedang belajar (Diknas, 2004) Dari konsep belajar muncul istilah pembelajaran. Degeng dalam Wena (2009) mengartikan pembelajaran sebagai upaya membelajarkan

⁵ Purwodarminto Wojowarsito, *Kamus Lengkap Indonesia-Inggris*, (Jakarta: Hasta, 1974), 6

⁶ Warren R. Plunkett, dkk., *Management: Meeting and Exceeding Customer Expectations*. 8 Edition. (USA: Thomson South-Western Co, 2005), 5.

⁷ Griffin, R., *Business*, 8th Edition. (NJ: Prentice Hall., 2006).

⁸ Syeb Kurdi dan Abdul Aziz, *Model pembelajaran efektif pendidikan Agama Islam di SD dan MI*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2006), 1.

siswa. Gagne dan Briggs mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu rangkaian events (kondisi, peristiwa, kejadian, dsb) yang secara sengaja dirancang untuk mempengaruhi pembelajar, sehingga proses belajarnya dapat berlangsung mudah (Diknas, 2004).⁹

Sedangkan manajemen pembelajaran adalah segala usaha pengaturan proses belajar mengajar dalam rangka tercapainya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Manajemen program pembelajaran sering disebut dengan manajemen kurikulum dan pembelajaran.¹⁰

Manajemen pembelajaran dapat didefinisikan sebagai usaha mengelola (*manage*) lingkungan belajar dengan sengaja agar seseorang belajar berperilaku tertentu dalam kondisi tertentu. Jadi, manajemen pembelajaran terbatas pada satu unsur manajemen lembaga pendidikan saja, sedangkan manajemen pendidikan meliputi seluruh komponen sistem pendidikan, bahkan bisa menjangkau sistem yang lebih luas dan besar secara regional, nasional, bahkan internasional.¹¹

Berdasarkan pemikiran tersebut manajemen pembelajaran dapat diartikan sebagai usaha ke arah pencapaian tujuan-tujuan melalui aktivitas-aktivitas orang lain, atau membuat sesuatu dikerjakan oleh orang-orang lain berupa peningkatan minat, perhatian, kesenangan, dan latar belakang siswa (orang yang belajar), dengan memperluas cakupan aktivitas (tidak terlalu dibatasi), serta mengarah kepada pengembangan gaya hidup di masa mendatang.¹²

b. Fungsi-fungsi Manajemen Pembelajaran

Menurut George R Terry,¹³ manajemen ialah suatu proses tertentu, terdiri dari *planning, organizing, actuating, controlling* dengan menggunakan dengan menggunakan seni dan ilmu pengetahuan untuk setiap fungsi itu dan merupakan petunjuk dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Menurut Made Pidarta manajemen menunjukkan bahwa fungsi atau kegiatan manajemen seperti *planning, organizing, actuating, dan controlling* secara langsung atau tidak langsung selalu bersangkutan dengan unsur manusia. *Planning* dalam manajemen adalah ciptaan manusia, *organizing* adalah mengatur unsur manusia, *actuating* adalah proses menggerakkan manusia-manusia anggota organisasi, sedang *controlling* diadakan agar pelaksanaan manajemen (manusia-manusia) selalu dapat meningkatkan hasilnya.¹⁴

1) Perencanaan Pembelajaran

Dalam perencanaan terdapat *strategic planning* yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan organisasi sehingga organisasi tetap maju dan

⁹ Permendiknas, No 41 tahun 2007 tentang *Standar Proses*.

¹⁰ Ibrahim Bafadal, *Manajemen Perlengkapan Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 11.

¹¹ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi, dan Implementasi*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, cet 1 2002), 39.

¹² Ella Yulaelawati. *Kurikulum dan Pembelajaran. Filosofi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Pakar Raya, 2004), 14.

¹³ Mannulang, *Dasar-dasar Management*, (Jakarta: Ghalia, 1976), 6

¹⁴ Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta 2004), 32.

berkembang.¹⁵ Demikian juga dalam organisasi pembelajaran, pembelajaran tidak akan pernah mencapai tujuan yang diinginkan tanpa ada strategi perencanaan yang bagus.

Dalam konteks pembelajaran, perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan.¹⁶ PP RI No. 19 Th. 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 20 menjelaskan bahwa; "Perencanaan proses pembelajaran memiliki silabus, perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar".¹⁷

Menurut Wina Sanjaya menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran terdiri atas dua kata, yaitu kata perencanaan dan pembelajaran. Untuk memahami konsep dasar perencanaan pembelajaran, berikut ini terdapat dua pemahaman tentang perencanaan pembelajaran: *pertama*, perencanaan yaitu pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, proses suatu perencanaan harus di mulai dari penetapan tujuan yang akan dicapai melalui analisis kebutuhan serta dokumen yang lengkap, kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Elly (1979), perencanaan itu pada dasarnya adalah suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang di harapkan.

Dari pendapat di atas, maka setiap perencanaan minimal harus memiliki empat unsure sebagai berikut :

- a) Adanya tujuan yang harus di capai.
- b) Adanya strategi untuk mencapai tujuan.
- c) Sumber daya yang dapat mendukung.
- d) Implementasi setiap keputusan.¹⁸

Perencanaan itu dapat bermanfaat bagi dosen sebagai kontrol terhadap diri sendiri agar dapat memperbaiki cara pengajarannya.¹⁹ Agar dalam pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik, untuk itu dosen perlu menyusun komponen perangkat perencanaan pembelajaran antara lain sebagai berikut:

- a) Menentukan Alokasi Waktu dan Minggu efektif. Menentukan alokasi waktu pada dasarnya adalah menentukan minggu efektif dalam setiap semester pada satu tahun ajaran. Rencana alokasi waktu berfungsi untuk mengetahui berapa jam waktu efektif yang tersedia untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran dalam satu tahun ajaran. Hal ini diperlukan

¹⁵ Manzini, E. *Sustainable Product Services Development; Workshop Organized by UNEP-WG-SPD en Pioneer industries on Sustainable Services*, (Amsterdam: In The INNES Conference challenge of Sustainable Development, 1996), 34.

¹⁶ Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran : Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 17.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, 15.

¹⁸ Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, Cet 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 23-24

¹⁹ Suryobroto, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, Cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), 27.

untuk menyesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar minimal yang harus dicapai sesuai dengan rumusan standard isi yang ditetapkan.²⁰

- b) Menyusun Program Tahunan (Prota). Program tahunan (Prota) merupakan rencana program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, yang dikembangkan oleh dosen mata pelajaran yang bersangkutan, yakni dengan menetapkan alokasi dalam waktu satu tahun ajaran untuk mencapai tujuan (standar kompetensi dan kompetensi dasar) yang telah ditetapkan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh dosen sebelum tahun ajaran, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya.²¹
- c) Menyusun Program Semester (Promes). Program semester (Promes) merupakan penjabaran dari program tahunan. Kalau Program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensidasar itu dilakukan.²²
- d) Menyusun Silabus Pembelajaran. Silabus adalah bentuk pengembangan dan penjabaran kurikulum menjadi rencana pembelajaran atau susunan materi pembelajaran yang teratur pada mata pelajaran tertentu pada kelas tertentu.²³ Komponen dalam menyusun silabus memuat antara lain identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), materi pelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.²⁴
- e) Menyusun Satuan Acara Perkuliahan (SAP). SAP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.²⁵ Komponen-komponen dalam menyusun SAP meliputi: a) identitas mata pelajaran; b) standar kompetensi; c) kompetensi dasar; d) indikator tujuan pembelajaran; e) materi ajar; f) metode pembelajaran; g) langkah-langkah pembelajaran; h) sarana dan sumber belajar; i) penilaian dan tindak lanjut. Selain itu dalam fungsi perencanaan tugas kepala lembaga pendidikan sebagai manajer yakni mengawasi dan mengecek perangkat yang dosen buat, apakah sesuai dengan pedoman kurikulum ataukah belum. Melalui perencanaan pembelajaran yang baik, dosen dapat mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan siswa dalam belajar.²⁶

2) Pengorganisasian Pembelajaran

²⁰ Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Sistem Pembelajaran*, 49.

²¹ E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 251.

²² Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Sistem Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 53

²³ Nazarudin, *Manajemen Pembelajaran: Implementasi Konsep, Karakteristik dan Metodologi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum*, (Yogyakarta: Teras 2007), 126

²⁴ Abin Syamsudin Makmun, *Pengelolaan Pendidikan*, (Bandung, Pustaka Eduka, 2010), 217.

²⁵ Ibid., 221.

²⁶ E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, 222-223.

Fungsi pengorganisasian dalam kegiatan pembelajaran merupakan upaya untuk menentukan pelaksana tugas dengan jelas kepada setiap personil lembaga pendidikan sesuai bidang, wewenang, mata pelajaran, dan tanggung jawabnya. Menurut Hick dan Gullet,²⁷ pengorganisasian adalah kegiatan membagi tugas dan tanggung jawab dan wewenang sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Syaiful Sagala²⁸ pengorganisasian pembelajaran meliputi beberapa aspek:

- a) Menyediakan fasilitas, perlengkapan dan personel yang diperlukan dalam Matakuliah Pendidikan Antikorupsi untuk penyusunan kerangka yang efisien dalam melaksanakan rencana-rencana melalui suatu proses penetapan pelaksanaan pembelajaran yang diperlukan untuk menyelesaikannya.
- b) Mengelompokkan komponen pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi dalam struktur lembaga pendidikan secara teratur.
- c) Membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi.
- d) Merumuskan dan menetapkan metode dan prosedur pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi.
- e) Pengorganisasian pembelajaran ini memberikan gambaran bahwa kegiatan belajar dan mengajar Matakuliah Pendidikan Antikorupsi mempunyai arah dan penanggungjawab yang jelas. Artinya dilihat dari komponen yang terkait dengan pembelajaran pada institusi lembaga pendidikan memberi gambaran bahwa jelas kedudukan kepala lembaga pendidikan dalam memberikan fasilitas dan kelengkapan pembelajaran, dan kedudukan dosen untuk menentukan dan mendesain pembelajaran dengan mengorganisasikan alokasi waktu, desain kurikulum, media dan kelengkapan pembelajaran, dan lainnya yang berkaitan dengan suksesnya penyelenggaraan kegiatan belajar. Kemudian jelas kedudukan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar baik di kelas maupun belajar di rumah, dibawah koordinasi dosen dan juga orang tua siswa yang berkaitan dengan belajar. Pengorganisasian pembelajaran ini dimaksudkan agar materi dan bahan ajaran yang sudah direncanakan dapat disampaikan secara maksimal.

3) Pelaksanaan Pembelajaran

Implementasi atau *directing*, yaitu proses pelaksanaan program pembelajaran agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam lembaga pendidikan serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.²⁹ Pelaksanaan pembelajaran merupakan proses berlangsungnya belajar mengajar di kelas yang merupakan inti dari kegiatan di lembaga pendidikan. Dalam fungsi pelaksanaan ini memuat kegiatan pengelolaan dan kepemimpinan pembelajaran yang

²⁷ Herbert Hicks and Ray Gullett, C., *Organization: Theory and Behavior*, (London: Mc Graw Hill, 1981), 321.

²⁸ Syaiful Sagala. *Konsep dan Makna Pembelajaran*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 143.

²⁹ Abdul Rohman, *Pengertian dan Fungsi Manajemen*, Makalah 2011, 3.

dilakukan dosen di kelas dan pengelolaan peserta didik. Oleh karena itu dalam hal pelaksanaan pembelajaran mencakup dua hal yaitu:

Pertama: pengelolaan kelas dan peserta didik. Pengelolaan kelas adalah satu upaya memperdayakan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif mencapai tujuan pembelajaran.³⁰ Berkenaan dengan pengelolaan kelas sedikitnya terdapat tujuh hal yang harus diperhatikan, yaitu ruang belajar, pengaturan sarana belajar, susunan tempat duduk, yaitu ruang belajar, pengaturan sarana belajar, susunan tempat duduk, penerangan, suhu, pemanasan sebelum masuk ke materi yang akan dipelajari (pembentukan dan pengembangan kompetensi) dan bina suasana dalam pembelajaran.³¹

Dosen dapat mengatur dan merencanakan segala sesuatunya, situasi yang ada ketika proses belajar mengajar berlangsung. Menurut Nana Sudjana yang dikutip oleh Suryobroto³² pelaksanaan proses belajar mengajar meliputi pentahapan sebagai berikut:

- a) Tahap pra instruksional. Tahap yang ditempuh pada saat memulai sesuatu proses belajar mengajar: Dosen menanyakan kehadiran siswa dan mencatat siswa yang tidak hadir; Bertanya kepada siswa sampai dimana pembahasan sebelumnya; Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai bahan pelajaran yang belum dikuasainya dari pelajaran yang sudah disampaikan; Mengulang bahan pelajaran yang lain secara singkat.
- b) Tahap instruksional. Tahap pemberian bahan pelajaran yang dapat diidentifikasi beberapa kegiatan sebagai berikut: menjelaskan kepada siswa tujuan pengajaran yang harus dicapai siswa; menjelaskan pokok materi yang akan dibahas; membahas pokok materi yang sudah dituliskan; pada setiap pokok materi yang dibahas sebaiknya diberikan contoh-contoh yang kongkret, pertanyaan, tugas; Penggunaan alat bantu pengajaran untuk memperjelas pembahasan pada setiap materi pelajaran; menyimpulkan hasil pembahasan dari semua pokok materi.
- c) Tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan tahap instruksional, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu: Mengajukan pertanyaan kepada kelas atau kepada beberapa murid mengenai semua aspek pokok materi yang telah dibahas pada tahap instruksional; Apabila pertanyaan yang diajukan belum dapat dijawab oleh siswa (kurang dari 70%), maka dosen harus mengulang pengajaran; Untuk memperkaya pengetahuan siswa mengenai materi yang dibahas, dosen dapat memberikan tugas atau PR; Akhiri pelajaran

³⁰ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), 173.

³¹ Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran : Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 165.

³² Suryobroto, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, Cet. II, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), 30-31.

dengan menjelaskan atau memberitahukan pokok materi yang akan dibahas pada pelajaran berikutnya.³³

Kedua, pengelolaan dosen. Pelaksanaan sebagai fungsi manajemen diterapkan oleh kepala lembaga pendidikan bersama dosen dalam pembelajaran agar siswa melakukan aktivitas belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Sehubungan dengan itu, peran kepala lembaga pendidikan memegang peranan penting untuk menggerakkan para dosen dalam mengoptimalkan fungsinya sebagai manajer di dalam kelas.

Dosen adalah orang yang bertugas membantu murid untuk mendapatkan pengetahuan sehingga ia dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dosen sebagai salah satu komponen dalam kegiatan pembelajaran, memiliki posisi sangat menentukan keberhasilan pembelajaran, karena fungsi utama dosen ialah merancang, mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Dosen harus dapat menempatkan diri dan menciptakan suasana kondusif, yang bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak. Selain itu, dengan kompetensi yang dimiliki oleh setiap dosen akan menunjukkan kualitas dosen yang sebenarnya, kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dari perbuatan secara profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen.

4) Mengawasi dan Mengevaluasi Pembelajaran

a) Mengawasi Pembelajaran

Konsepsi pemantauan secara umum menunjuk pada upaya mengamati dan pengendalian kegiatan agar sesuai dengan rencana. Pemantauan dalam konteks kegiatan pembelajaran orang dewasa pada hakekatnya sama saja. Namun tekanannya pada situasi dan kondisi warga belajar dalam melakukan tugas belajar.

Konsepsi disiplin mengacu pada ketertiban pelaksanaan kegiatan yang berpedoman pada peraturan yang telah disepakati bersama dan telah ditentukan dalam perencanaan. Dalam konteks pembelajaran orang dewasa, disiplin menyangkut ketertiban tutor yang menciptakan suasana belajar dan ketertiban warga belajar dalam melakukan tugas-tugas belajar.³⁴ Pengawasan adalah suatu konsep yang luas yang dapat diterapkan pada manusia, benda dan organisasi. Pengawasan dimaksudkan untuk memastikan anggota organisasi melaksanakan apa yang dikehendaki dengan mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi informasi serta memanfaatkannya untuk mengendalikan organisasi.³⁵

Menurut Syaiful Sagala,³⁶ pengawasan dalam konteks pembelajaran dilakukan oleh kepala lembaga pendidikan terhadap kegiatan pembelajaran pada seluruh kelas, termasuk mengawasi pihak-pihak terkait sehubungan dengan pemberian pelayanan kebutuhan pembelajaran secara sungguh-sungguh. Untuk keperluan pengawasan ini, dosen mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi kegiatan belajar, serta memanfaatkannya untuk

³³ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), 173.

³⁴ Ratna Wilis Dahar, *Teori-teori Belajar*, (Jakarta: Erlangga, 1989), 52.

³⁵ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen; Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 197.

³⁶ Syaiful sagala, *Supervisi Pengajaran*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 133.

mengendalikan pembelajaran sehingga tercapai tujuan belajar yang telah direncanakan.

b) Mengevaluasi Pembelajaran

Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "evaluation". Menurut Wand dan Gerald W. Brown evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.³⁷ Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara: [1] membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan dosen dengan standar proses, dan [2] mengidentifikasi kinerja dosen dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi dosen. Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja dosen dalam proses pembelajaran.

Evaluasi merupakan suatu upaya untuk mengetahui berapa banyak hal-hal yang telah dimiliki oleh siswa dari hal-hal yang telah diajarkan oleh dosen.³⁸ Evaluasi pembelajaran mencakup evaluasi hasil belajar dan evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi hasil belajar menekankan pada diperolehnya informasi tentang seberapa jauh perolehan siswa dalam mencapai tujuan pengajaran yang ditetapkan.³⁹

Pertama, evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil belajar merupakan proses untuk menentukan nilai belajar siswa melalui kegiatan penilaian dan atau pengukuran hasil belajar, tujuan utama evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan yang tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau simbol. Apabila tujuan utama kegiatan evaluasi hasil belajar ini sudah terealisasi maka hasilnya dapat difungsikan untuk berbagai keperluan tertentu.⁴⁰

Menurut Suryobroto,⁴¹ adapun langkah-langkah evaluasi hasil pembelajaran meliputi: (1) evaluasi formatif. Evaluasi formatif seringkali diartikan sebagai kegiatan evaluasi yang dilakukan pada akhir pembahasan setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan.⁴² Evaluasi ini yakni diselenggarakan pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar, yang diselenggarakan secara periodik, isinya mencakup semua unit pengajaran yang telah diajarkan; (2) evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang diselenggarakan oleh dosen setelah jangka waktu tertentu pada akhir semester. Penilaian sumatif berguna untuk memperoleh informasi tentang keberhasilan belajar pada siswa, yang dipakai sebagai masukan utama untuk menentukan nilai rapor akhir semester.⁴³

³⁷ Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 17.

³⁸ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 156.

³⁹ Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses.

⁴⁰ Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses.

⁴¹ Suryobroto, *Proses Belajar...*, 53.

⁴² Indah Komsiyah, *Belajar dan Pembelajaran*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 125.

⁴³ Suryobroto, *Proses Belajar...*, 44.

Kedua, evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran yakni untuk menentukan kualitas dari suatu program pembelajaran secara keseluruhan yakni dari mulai tahap proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran. Evaluasi ini memusatkan pada keseluruhan kinerja dosen dalam proses pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara:

- (1) Membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan dosen dengan standard proses.
- (2) Mengidentifikasi kinerja dosen dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi dosen. Sebagai implikasi dari evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan dosen maupun kepala lembaga pendidikan dapat dijadikan umpan balik untuk program pembelajaran selanjutnya.⁴⁴ Jadi evaluasi pada program pembelajaran meliputi: (a) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, dibanding dengan rencana; (b) melaporkan penyimpangan untuk tindakan koreksi dan merumuskan tindakan koreksi, menyusun standar-standar pembelajaran dan sasaran-sasaran; dan (c) menilai pekerjaan dan melakukan tindakan terhadap penyimpangan-penyimpangan baik institusional satuan pendidikan maupun proses pembelajaran.⁴⁵

Adapun alat evaluasi pembelajaran diantaranya sebagai berikut: (1) tes hasil belajar. Untuk mengukur keberhasilan belajar siswa atau dikenal dengan istilah Penilaian Acuan Patokan (PAP). PAP bisa digunakan bila dosen menggunakan tes seperti: tes prasyarat (*entry-behavior test*), tes awal (*pre test*), tes akhir (*post tes*), dan tes pengukur kemajuan (*progress test*); (2) kriteria test. Sebagai alat ukur dalam evaluasi, tes harus memiliki dua criteria, yaitu validitas dan realibilitas; dan (3) jenis-jenis tes. Tes berdasarkan jumlah siswa, ada tes kelompok atau tes individual. Sedangkan dari cara pelaksanaan, tes dapat dibedakan menjadi tes lisan, tes tulisan dan tes perbuatan.⁴⁶

2. Pendidikan Antikorupsi

a. Istilah Korupsi

Istilah “korupsi” berasal dari bahasa latin *corruptio* dari perspektif Fockema Andrea atau *corruptus* dari perspektif *Webster Student Dictionary*. Kata *corruptio* sendiri punya kata kerja, *corrumpere* (suatu bahasa Latin yang lebih tua), yang artinya busuk, rusak menggoyangkan, memutarbalikkan, atau menyogok. Dari bahasa latin tersebut dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjururan, dapat suap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian.⁴⁷

⁴⁴ Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses.

⁴⁵ Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran...*, 146

⁴⁶ Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain*, 232-234

⁴⁷ Tim Penulis, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Bagian Hukum Kepegawaian, 2011), 23. Lihat juga di dalam buku Ignas G Saksiono, *Tantangan Pendidik(an) Memecahkan*

Dalam bahasa Arab, korupsi disebut *risywah* yang berarti penyuapan. *Risywah* juga diartikan sebagai uang suap. Selain dinilai sebagai sebuah tindakan merusak dan khianat, korupsi juga disebut *fasdd (ifsdd)* dan *ghulul*.⁴⁸ *Risywah* secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan (*al-Misbah al-Muniral-Fayumi, al-Muhalla-Ibnu Hazm*). Semua ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan putusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa *Nash Qur'aniyah* dan *Sunnah Nabawiyah* yang antara lain menyatakan: "Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram" (QS Al Maidah 42). Imam al-Hasan dan Said bin Jubair menginterpretasikan '*akkaaluna lissuhti*' dengan *risywah*. Dengan demikian, *risywah* identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah SWT., diharamkan mencari suap, menyuap, menerima suap, dan mediator antara penyuap dan yang disuap. Hanya saja jumhur ulama membolehkan penyuapan yang dilakukan untuk memperoleh hak dan mencegah kezhaliman seseorang. Namun orang yang menerima suap tetap berdosa (Kasyful Qona' 6/316, Nihayatul Muhtaj 8/243, al-Qurtubi 6/183, Ibnu Abidin 4/304, al-Muhalla 8/118, Matalib Ulin Nuha 6/479).⁴⁹

Dalam terminologi fiqh Islam, korupsi juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan (*jarimah*) terhadap amanah. Korupsi identik dengan *risywah* dan *at-tajawwuz fi isti'mal al-haq* (menyalahgunakan wewenang). Jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi disebut pencurian (*sariqah*) dan jika dilakukan secara terang-terangan disebut sebagai perampokan (*al-nahb*).⁵⁰ Korupsi termasuk kejahatan terhadap harta benda manusia (*akl amwal al-nas bi al-bathil*) dan secara esensial mirip dengan *ghulul*, yaitu pengkhianatan terhadap amanah dalam pengelolaan harta rampasan perang (*ghanimah*). *Ghulul* jelas-jelas diharamkan dalam al-Qur'an dengan ancaman bahwa pelakunya akan membawa serta barang yang dikorupsinya sebagai pertanggungjawaban di akhirat.⁵¹

Apabila dilihat dari aspek terminologi, Bank Dunia dan Lembaga Internasional Transparansi⁵² menganut definisi klasik yang memandang

Problem Bangsa: Tanggapan terhadap Pembatalan UU BHP, (Yogyakarta: Forkoma PMKRI, 2010), 22.

⁴⁸Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Ponpes Krapyak al-Munawwir, 1884), 537,

⁴⁹Tim Penulis, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Bagian Hukum Kepegawaian, 2011), 23-24.

⁵⁰Hasyim Muzadi, "Merubah Perilaku Korup Melalui Moral Keagamaan", dalam artikel di www.nu-anti.korupsi.or.id, diakses pada 5 Maret 2007.

⁵¹A. Malik Madany, "Korupsi Sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Islam", dalam artikel di www.nu-anti.korupsi.or.id, diakses pada 5 Maret 2007. Sumiarti, *Pendidikan Anti korupsi*, P3M STAIN Purwokerto: INSANIA, Vol. 12, No. 2, 8 Mei-Ags 2007, 189-207

⁵²Singgih, *Dunia Pun Memerangi Korupsi: Beberapa Catatan dari International Anti Corruption Conference I – X dan Dokumen PBB tentang Pemberantasan Korupsi*, (Tangerang: Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pellita Harapan, 2002),120.

korupsi sebagai: "Penggunaan posisi seseorang di masyarakat untuk mendapat keuntungan pribadi secara tidak sah". Penyalahgunaan kekuasaan dan memperoleh keuntungan pribadi tersebut dapat terjadi di bidang kekuasaan pemerintah maupun swasta, dan seringkali terjadi kolusi antara individu-individu dari keduanya. Oleh karena itu, Badan Informasi Internasional di Libanon memakai istilah: "Korupsi adalah perilaku individu-individu swasta maupun pejabat pemerintah yang telah menyimpang dari tanggung jawab yang telah ditetapkan dengan menggunakan jabatan atau kekuasaan mereka untuk mencapai tujuan pribadi maupun mengamankan keuntungan pribadi." (*Lebanon Anti Corruption Initiative Report 1999*).

3. Manajemen Pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi

a. Matakuliah Pendidikan Antikorupsi

Matakuliah Pendidikan Antikorupsi ini tidak berlandaskan pada salah satu perspektif keilmuan secara khusus. Berlandaskan pada fenomena permasalahan serta pendekatan budaya yang telah diuraikan diatas, matakuliah ini lebih menekankan pada pembangunan karakter antikorupsi (*anti-corruption character building*) pada diri individu mahasiswa. Mata kuliah Pendidikan antikorupsi yang dirumuskan Dirjen Dikti Kemendikbud lebih berorientasi berupa sebuah matakuliah yang berdiri sendiri (*independen*), yang diselenggarakan secara reguler dalam 14–16 pertemuan selama satu semester. Matakuliah ini dapat ditetapkan sebagai matakuliah yang bersifat wajib maupun pilihan di dalam kurikulum per dosenan tinggi. Tentu tidak menutup kemungkinan materi dan metode pembelajaran ini nantinya diterapkan juga pada bentuk-bentuk pendidikan diluar matakuliah independen. Materi Antikorupsi dapat disampaikan dalam satu atau beberapa pertemuan (insersi) dalam sebuah matakuliah tertentu, atau dalam bentuk pelatihan, kampanye, seminar dan sebagainya. Metode yang dipergunakan dapat disesuaikan dengan keterbatasan ruang, waktu dan kondisi.⁵³

Dengan demikian tujuan dari matakuliah Anti-korupsi adalah membentuk kepribadian antikorupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.⁵⁴ Hal ini menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif

⁵³ Kemendikbud, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Badan Hukum Kepegawaian, 2011), 3.

⁵⁴ *Ibid*, 5.

mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁵

Sedangkan dalam Pedoman Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi Dirjen Diktis Kementerian Agama RI 2013⁵⁶, Pendidikan Antikorupsi di perdosenan tinggi bisa menggunakan beberapa pendekatan yang diterapkan dalam kurikulum pendidikan antikorupsi, yang masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Model dan pendekatan tersebut di antaranya: model sebagai Mata Pelajaran tersendiri. Pendidikan antikorupsi disampaikan sebagai mata pelajaran tersendiri seperti bidang studi yang lain. Dalam hal ini dosen bidang studi pembelajaran antikorupsi harus membuat Garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP), Satuan Pelajaran (SP), Rencana Pengajaran (RP), metodologi pengajaran, dan evaluasi pengajaran. Selain itu, pembelajaran antikorupsi sebagai mata pelajaran harus masuk dalam jadwal yang terstruktur. Keunggulan pendidikan antikorupsi sebagai mata pelajaran adalah materi lebih terfokus dan terencana dengan matang. Dengan demikian, pelajaran lebih terstruktur dan terukur sebagai informasi. Ada jam yang sudah ditentukan sebagai kesempatan untuk memberikan informasi secara pasti. Dosen dapat membuat perencanaan dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya.

Sedangkan materi yang ditawarkan Dirjen Pendidikan Islam Direktorat Madrasah RI di antaranya: 1) apa dan di mana korupsi itu, 2) sebab - sebab korupsi, 3) isu moral, 4) korupsi dan hak asasi manusia, 5) memerangi korupsi, 6) korupsi dan ekonomi pasar, 7) korupsi dan hukum, 8) korupsi dan masyarakat demokrasi, 9) hak dan kewajiban warga Negara, 10) pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan 11) tata kelola pemerintahan yang baik. Materi-materi tersebut juga bisa diterapkan di perdosenan tinggi, tapi proses kajian dan analisisnya lebih komprehensif, kritis dan konstruktif.

Dalam buku Pendidikan Antikorupsi untuk Perdosenan Tinggi dijelaskan, matakuliah pendidikan antikorupsi ini berisi tentang materi-materi sebagai berikut: model pembelajaran matakuliah antikorupsi; pengertian korupsi; faktor penyebab korupsi; dampak massif korupsi; nilai dan prinsip antikorupsi; upaya pemberantasan korupsi; gerakan, kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi; tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan peranan santri dalam pencegahan korupsi.⁵⁷

Dengan diajarkannya materi-materi tersebut, maka rumusan diskriptif tujuan pendidikan antikorupsi dari matakuliah Antikorupsi adalah membentuk kepribadian antikorupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat

⁵⁵ *Ibid.*, v.

⁵⁶ Kementerian Agama, *Pedoman Model Integrasi Pendidikan Anti korupsi dalam Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2013*, (Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2013), 5-9.

⁵⁷ Materi-materi ini diambil dari buku yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Untuk lebih jelasnya, lihat Tim Penulis, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Bagian Hukum Kepegawaian, 2011).

dan kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.⁵⁸

Dari tujuan di atas, jika dirumuskan dalam Standar Kompetensi (SK), maka kompetensi yang ingin dicapai adalah :

- 1) Mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi (*individual competence*).
- 2) Mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan orang tersebut.
- 3) Mahasiswa mampu mendeteksi adanya tindak korupsi (dan melaporkannya kepada penegak hukum). Adapun penjelasan adalah sebagai berikut :
 - a) Kompetensi individual dimulai dari mahasiswa memiliki persepsi negatif mengenai korupsi dan persepsi positif mengenai antikorupsi, menguatnya kesadaran (*awareness*) terhadap adanya potensi tindak korupsi. Mahasiswa akhirnya memiliki sikap antikorupsi dalam arti berusaha untuk tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun.
 - b) Sikap antikorupsi ini kemudian memberikan efek-tular ke lingkungan sekitar dimana mahasiswa berani mengingatkan atau mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dalam bentuk apapun, termasuk mampu memberikan informasi kepada orang lain mengenai hal-hal terkait korupsi dan antikorupsi.
 - c) Kompetensi selanjutnya adalah mahasiswa mampu mendeteksi adanya suatu tindak korupsi secara komprehensif mulai dari bentuk, proses, peraturan yang dilanggar, pelaku, kerugian/dampak yang ditimbulkan; selanjutnya mampu menghasilkan penyelesaian masalah (*problem solving*). Melaporkan kepada penegak hukum mungkin saja dilakukan, namun harus memiliki bukti-bukti yang valid.

b. Manajemen Pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi

Supaya matakuliah pendidikan antikorupsi berjalan dengan baik, maka dibutuhkan suatu manajemen pembelajaran. Menurut Terry, manajemen adalah proses, yakni aktifitas yang terdiri dari empat subyektivitas yang masing-masing merupakan fundamental. Keempat subyektivitas itu- yang ada dalam dunia manajemen dikenal sebagai P.O.A.C adalah *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), *controlling* (pengawasan).⁵⁹ Oleh karena itu, implementasi manajemen pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi sangat berkaitan dengan empat unsur manajemen tersebut.

Berpijak dari konsep manajemen dan pembelajaran, maka konsep manajemen pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi dapat diartikan proses mengelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian (pengarahan) dan pengevaluasian kegiatan yang berkaitan dengan

⁵⁸ Kemendikbud, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Badan Hukum Kepegawaian, 2011), 5.

⁵⁹ Mochtar Effendy, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Agama Islam*. (Jakarta: PT. Bharata Karya Aksara, 1986), 6-7.

proses membelajarkan si pembelajar dengan mengikutsertakan berbagai faktor di dalamnya guna mencapai tujuan matakuliah pendidikan antikorupsi. Dalam “memanaje” atau mengelola pembelajaran, manajer dalam hal ini dosen melaksanakan berbagai langkah kegiatan mulai dari merencanakan pembelajaran, mengorganisasikan pembelajaran, mengarahkan dan mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan. Pengertian manajemen pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi dapat diartikan secara luas dalam arti mencakup keseluruhan kegiatan bagaimana membelajarkan mahasiswa mulai dari perencanaan pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi sampai pada penilaian pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi.⁶⁰

Adapun empat unsur manajemen pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi dijelaskan sebagai berikut:

1) Fungsi Perencanaan Pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi

Dalam konteks pembelajaran, perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan.⁶¹ PP. RI No. 19 Th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 20 menjelaskan bahwa; ”Perencanaan proses pembelajaran memiliki silabus, perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar”.⁶²

Secara terperinci, rumusan penyusunan komponen perangkat perencanaan pembelajaran antara lain:

- a) Merumuskan tujuan khusus. Rumusan tujuan pembelajaran harus mencakup tiga aspek penting yang di istilahkan oleh Bloom (1956) merupakan domain kognitif, afektif dan domain psikomotorik.
- b) Pengalaman belajar. Langkah kedua dalam merencanakan pembelajaran adalah memilih pengalaman belajar yang harus dilakukan mahasiswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal, akan tetapi proses berpengalaman.
- c) Kegiatan belajar mengajar. Menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai, pada dasarnya kita dapat merancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individu.
- d) Orang-orang yang terlibat. Peran dosen dalam proses pembelajaran adalah sebagai pengelola pembelajaran. Dalam pelaksanaan peran tersebut diantaranya dosen berfungsi sebagai penyampai informasi. Agar dosen dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik, maka dosen harus memiliki kemampuan untuk

⁶⁰ Ella Yulaelawati, *Kurikulum dan Pembelajaran. Filosofi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : Pakar Raya, 2004), 76.

⁶¹ Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran...*, 17.

⁶² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, 15.

berbicara serta berkomunikasi, menggunakan berbagai media seperti, OHP, LCD, papan tulis dan lain sebagainya.

- e) Bahan dan alat. Pemilihan bahan dan alat juga merupakan bagian dari system perencanaan pembelajaran.
- f) Fasilitas fisik. Fasilitas fisik merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran.
- g) Perencanaan evaluasi dan pengembangan. Prosedur evaluasi merupakan faktor penting dalam sebuah sistem perencanaan pembelajaran. Melalui evaluasi kita dapat melihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran.⁶³

2) Fungsi Pengorganisasian Pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi

Selain fungsi perencanaan, terdapat pula fungsi pengorganisasian dalam kegiatan pembelajaran yang dimaksudkan untuk menentukan pelaksana tugas dengan jelas kepada setiap personil lembaga pendidikan sesuai bidang, wewenang, mata pelajaran, dan tanggung jawabnya. Menurut Hick dan Gullet,⁶⁴ pengorganisasian adalah kegiatan membagi tugas dan tanggung jawab dan wewenang sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengorganisasian pembelajaran menurut Syaiful Sagala meliputi beberapa aspek:

- a) Menyediakan fasilitas, perlengkapan dan personel yang diperlukan untuk penyusunan kerangka yang efisien dalam melaksanakan rencana-rencana melalui suatu proses penetapan pelaksanaan pembelajaran yang diperlukan untuk menyelesaikannya.
- b) Mengelompokkan komponen pembelajaran dalam struktur lembaga pendidikan secara teratur.
- c) Membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi pembelajaran.
- d) Merumuskan dan menetapkan metode dan prosedur pembelajaran.
- e) Pengorganisasian pembelajaran ini memberikan gambaran bahwa kegiatan belajar dan mengajar mempunyai arah dan penanggungjawab yang jelas. Artinya dilihat dari komponen yang terkait dengan pembelajaran pada institusi lembaga pendidikan memberi gambaran bahwa jelas kedudukan kepala lembaga pendidikan dalam memberikan fasilitas dan kelengkapan pembelajaran, dan kedudukan dosen untuk menentukan dan mendesain pembelajaran dengan mengorganisasikan alokasi waktu, desain kurikulum, media dan kelengkapan pembelajaran, dan lainnya yang berkaitan dengan suksesnya penyelenggaraan kegiatan belajar. Kemudian jelas kedudukan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan belajar baik di kelas maupun belajar di rumah, dibawah koordinasi dosen dan juga orang tua

⁶³ Sarwan, *Manajemen Pembelajaran PAI*, (Jember: IAIN Jember, 2016), 114.

⁶⁴ Herbert Hicks and Ray Gullett, C., *Organization: Theory and Behavior*, (London: Mc Graw Hill, 1981), 321.

mahasiswa yang berkaitan dengan belajar. Pengorganisasian pembelajaran ini dimaksudkan agar materi dan bahan ajaran yang sudah direncanakan dapat disampaikan secara maksimal.⁶⁵

3) Fungsi Pelaksanaan Pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi

Pelaksanaan pembelajaran merupakan proses berlangsungnya belajar mengajar di kelas yang merupakan inti dari kegiatan di lembaga pendidikan. Jadi pelaksanaan pengajaran adalah interaksi dosen dengan murid dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada mahasiswa dan untuk mencapai tujuan pengajaran.

Dalam fungsi pelaksanaan ini memuat kegiatan pengelolaan dan kepemimpinan pembelajaran yang dilakukan dosen di kelas dan pengelolaan peserta didik. Oleh karena itu dalam hal pelaksanaan pembelajaran mencakup dua hal yaitu: *pertama*, pengelolaan kelas dan peserta didik. Pengelolaan kelas adalah satu upaya memperdayakan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif mencapai tujuan pembelajaran.⁶⁶ Berkenaan dengan pengelolaan kelas sedikitnya terdapat tujuh hal yang harus diperhatikan, yaitu ruang belajar, pengaturan sarana belajar, susunan tempat duduk, yaitu ruang belajar, pengaturan sarana belajar, susunan tempat duduk, penerangan, suhu, pemanasan sebelum masuk ke materi yang akan dipelajari (pembentukan dan pengembangan kompetensi) dan bina suasana dalam pembelajaran.⁶⁷ Dosen dapat mengatur dan merekayasa segala sesuatunya, situasi yang ada ketika proses belajar mengajar berlangsung. Menurut Nana Sudjana yang dikutip oleh Suryobroto⁶⁸ pelaksanaan proses belajar mengajar meliputi tahap pra instruksional, tahap instruksional, dan tahap evaluasi serta tindak lanjut. Adapun penjelasannya yaitu di bawah ini:

- a) Tahap pra instruksional. Tahap yang ditempuh pada saat memulai sesuatu proses belajar mengajar: Dosen menanyakan kehadiran mahasiswa dan mencatat mahasiswa yang tidak hadir; Bertanya kepada mahasiswa sampai dimana pembahasan sebelumnya; Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya mengenai bahan pelajaran yang belum dikuasainya dari pelajaran yang sudah disampaikan; Mengulang bahan pelajaran yang lain secara singkat.
- b) Tahap instruksional. Tahap pemberian bahan pelajaran yang dapat diidentifikasi beberapa kegiatan sebagai berikut: menjelaskan kepada mahasiswa tujuan pengajaran yang harus dicapai mahasiswa; menjelaskan pokok materi yang akan dibahas; membahas pokok materi yang sudah dituliskan; pada setiap pokok materi yang dibahas sebaiknya diberikan contoh-contoh yang kongkret, pertanyaan, tugas; Penggunaan alat bantu pengajaran

⁶⁵ Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran...*, 143.

⁶⁶ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak didik...*, 173.

⁶⁷ Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran...*, 165.

⁶⁸ Suryobroto, *Proses Belajar Mengajar...*, 30-31.

untuk memperjelas pembahasan pada setiap materi pelajaran; menyimpulkan hasil pembahasan dari semua pokok materi.

- c) Tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan tahap instruksional, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu: Mengajukan pertanyaan kepada kelas atau kepada beberapa murid mengenai semua aspek pokok materi yang telah dibahas pada tahap instruksional; Apabila pertanyaan yang diajukan belum dapat dijawab oleh mahasiswa (kurang dari 70%), maka dosen harus mengulang pengajaran; Untuk memperkaya pengetahuan mahasiswa mengenai materi yang dibahas, dosen dapat memberikan tugas atau PR; Akhiri pelajaran dengan menjelaskan atau memberitahukan pokok materi yang akan dibahas pada pelajaran berikutnya.⁶⁹

Kedua, pengelolaan dosen. Pelaksanaan sebagai fungsi manajemen diterapkan oleh kepala lembaga pendidikan bersama dosen dalam pembelajaran agar mahasiswa melakukan aktivitas belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Sehubungan dengan itu, peran kepala lembaga pendidikan memegang peranan penting untuk menggerakkan para dosen dalam mengoptimalkan fungsinya sebagai manajer di dalam kelas.

Sedangkan menurut Zulaichah Ahmad,⁷⁰ Dalam pembelajaran, tugas dosen yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Umumnya pelaksanaan pembelajaran mencakup tiga hal, yaitu: *pertama*, pre tes; pre tes (tes awal) pada umumnya pelaksanaan proses pembelajaran dimulai dengan pre tes, pre tes berguna untuk menjajaki proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. *Kedua*, proses (pembentukan kompetensi); proses yang dimaksudkan adalah pelaksanaan proses pembelajaran, yakni bagaimana tujuan-tujuan belajar direalisasikan. Proses pembelajaran perlu dilakukan dengan tenang dan menyenangkan, hal tersebut tentu saja menuntut aktivitas dan kreativitas dosen dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Proses pembelajaran dikatakan aktif apabila seluruh peserta didik terlibat secara aktif, baik mental, fisik dan sosialnya. *Ketiga*, post tes. Pada umumnya pelaksanaan pembelajaran diakhiri dengan post tes, sama halnya dengan pre tes, post tes juga memiliki banyak kegunaan; terutama dalam melihat keberhasilan pembelajaran.

Sarwan⁷¹ juga berpendapat bahwa secara umum ada tiga pokok tahapan pembelajaran yakni tahap permulaan pembelajaran, tahap pembelajaran, dan tahap penilaian dan tindak lanjut. Ketiga tahapan di atas, harus dilaksanakan dalam pembelajaran. Jika salah satu tahapan ditinggalkan, maka tidak dapat dikatakan telah terjadi proses pembelajaran.

⁶⁹ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), 173.

⁷⁰ Zulaichah Ahmad, *Perencanaan Pembelajaran PAI*, (Jember: Madania Center Press, 2008), 35-38.

⁷¹ Sarwan, *Belajar dan Pembelajaran*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 91-94.

Adapun diskripsi tiap-tiap tahap pembelajaran tersebut yaitu: *pertama*: tahap pra pembelajaran. Tahap pra pembelajaran merupakan tahapan yang ditempuh dosen pada saat ia memulai proses pembelajaran. Beberapa kegiatan yang dilakukan dosen atau mahasiswa pada tahapan ini:

- a) Dosen menanyakan kehadiran mahasiswa dan mencatat siapa yang tidak hadir. Kehadiran mahasiswa dalam pembelajaran dapat dijadikan salah satu tolak ukur kemampuan dosen dalam mengajar. Ketidakhadiran mahasiswa, disebabkan kondisi mahasiswa yang bersangkutan (sakit, malas, bolos, dan lain-lain), tetapi terjadi karena penyampaian dosen tidak menyenangkan, sikapnya tidak disukai mahasiswa, atau karena tindakan dosen waktu mengajar dianggap merugikan mahasiswa (penilaian tidak adil, memberi hukuman yang menyebabkan frustrasi) dan sebagainya.
- b) Mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa di kelas, atau mahasiswa tertentu tentang bahan pelajaran yang sudah diberikan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sampai di mana pemahaman tentang materi yang telah diberikan.
- c) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya mengenai bahan pelajaran yang belum dikuasainya dari pengajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya.
- d) Mengulang kembali bahan pelajaran yang lalu (*remedial teaching*) secara singkat tapi mencakup semua bahan yang telah dibahas sebelumnya.
- e) Tujuan tahapan ini adalah mengungkapkan kembali tanggapan mahasiswa terhadap bahan yang telah diterima dan menumbuhkan kondisi belajar dalam hubungannya dengan pelajaran yang berlangsung.

Kedua, tahap pembelajaran. Tahap kedua merupakan tahap inti yakni tahapan memberikan bahan pelajaran yang telah disusun dosen sebelumnya. Secara umum dapat diidentifikasi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a) Menjelaskan pada mahasiswa tujuan pembelajaran yang harus dicapai mahasiswa.
- b) Membahas pokok materi yang ditempuh dua cara yakni: (1) pembahasan dimulai dari umum menuju ke topik secara khusus yang disebut strategi deduktif, (2) dimulai dari topik khusus menuju ke topik umum yang disebut induktif.
- c) Pada setiap pokok materi yang dibahas sebaiknya diberikan contoh-contoh konkret. Demikian pula mahasiswa harus diberikan pertanyaan atau tugas, untuk mengetahui tingkat pemahaman dari setiap pokok materi yang telah dibahas.
- d) Penggunaan alat bantu pengajaran untuk memperjelas pembahasan setiap pokok materi sangat diperlukan.
- e) Menyimpulkan hasil pembahasan pokok materi. Kesimpulan dibuat oleh dosen dan sebaiknya pokok-pokoknya ditulis dipapan tulis untuk dicatat mahasiswa. Kesimpulan dapat pula dibuat

dosen bersama-sama mahasiswa, bahkan kalau mungkin diserahkan sepenuhnya kepada mahasiswa.

Ketiga, tahap penutup. Tujuan tahapan ini ialah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pembelajaran. Ketiga tahap di atas merupakan serangkaian kegiatan yang terpadu dan tidak terpisahkan satu sama lain. Dosen dituntut untuk mampu dan mengatur waktu kegiatan secara fleksibel, sehingga ketiga rangkaian tersebut diterima oleh mahasiswa secara utuh. Di sinilah letak keterampilan profesional seorang dosen dalam melaksanakan strategi mengajar. Kemampuan mengajar seperti dilukiskan dalam uraian di atas secara teoritis mudah dikuasai, namun dalam praktiknya tidak semudah dilaksanakan. Hanya dengan latihan dan kebiasaan yang terencana, kemampuan itu dapat diperoleh.

4) Fungsi Mengawasi dan Mengevaluasi Pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi

Konsepsi pemantauan secara umum menunjuk pada upaya mengamati dan pengendalian kegiatan agar sesuai dengan rencana. Pemantauan dalam konteks kegiatan pembelajaran orang dewasa pada hakekatnya sama saja. Namun tekanannya pada situasi dan kondisi warga belajar dalam melakukan tugas belajar.⁷² Adapun pengawasan dalam konteks pembelajaran dilakukan oleh kepala lembaga pendidikan terhadap kegiatan pembelajaran pada seluruh kelas, termasuk mengawasi pihak-pihak terkait sehubungan dengan pemberian pelayanan kebutuhan pembelajaran secara sungguh-sungguh. Untuk keperluan pengawasan ini, dosen mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi kegiatan belajar, serta memanfaatkannya untuk mengendalikan pembelajaran sehingga tercapai tujuan belajar yang telah direncanakan.⁷³

Sedangkan evaluasi proses pembelajaran merupakan suatu upaya untuk mengetahui berapa banyak hal-hal yang telah dimiliki oleh mahasiswa dari hal-hal yang telah diajarkan oleh dosen. Evaluasi pembelajaran mencakup evaluasi hasil belajar dan evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi hasil belajar menekankan pada diperolehnya informasi tentang seberapa perolehan mahasiswa dalam mencapai tujuan pengajaran yang ditetapkan.

Dalam Permendiknas No. 41 Tahun 2007,⁷⁴ evaluasi pembelajaran ada dua, yaitu: evaluasi hasil belajar dan evaluasi proses pembelajaran. *Pertama*, evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar merupakan proses untuk menentukan nilai belajar mahasiswa melalui kegiatan penilaian dan atau pengukuran hasil belajar. Tujuan utama evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan yang tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau simbol.

⁷² Ratna Wilis Dahar, *Teori-Teori Belajar*, 52.

⁷³ Syaiful sagala, *Supervisi Pengajaran...*, 133.

⁷⁴ Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses.

Apabila tujuan utama kegiatan evaluasi hasil belajar ini sudah terealisasi maka hasilnya dapat difungsikan untuk berbagai keperluan tertentu.⁷⁵

Menurut Suryobroto,⁷⁶ adapun bentuk langkah-langkah evaluasi hasil pembelajaran meliputi: (1) evaluasi formatif. Evaluasi formatif seringkali diartikan sebagai kegiatan evaluasi yang dilakukan pada akhir pembahasan setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan.⁷⁷ Evaluasi ini yakni diselenggarakan pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar, yang diselenggarakan secara periodik, isinya mencakup semua unit pengajaran yang telah diajarkan, dan (2) evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang diselenggarakan oleh dosen setelah jangka waktu tertentu pada akhir semesteran. Penilaian sumatif berguna untuk memperoleh informasi tentang keberhasilan belajar pada mahasiswa, yang dipakai sebagai masukan utama untuk menentukan nilai rapor akhir semester.⁷⁸

Kedua, evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran yakni untuk menentukan kualitas dari suatu program pembelajaran secara keseluruhan yakni dari mulai tahap proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran. Evaluasi ini memusatkan pada keseluruhan kinerja dosen dalam proses pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara:

- a) Membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan dosen dengan standard proses.
- b) Mengidentifikasi kinerja dosen dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi dosen. Sebagai implikasi dari evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan dosen maupun kepala sekolah dapat dijadikan umpan balik untuk program pembelajaran selanjutnya.⁷⁹ Jadi, evaluasi pada program pembelajaran meliputi: (1) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, dibanding dengan rencana; (2) melaporkan penyimpangan untuk tindakan koreksi dan merumuskan tindakan koreksi, menyusun standar-standar pembelajaran dan sasaran-sasaran; dan (3) menilai pekerjaan dan melakukan tindakan terhadap penyimpangan-penyimpangan baik institusional satuan pendidikan maupun proses pembelajaran.⁸⁰

Adapun alat evaluasi pembelajaran diantaranya sebagai berikut: (1) tes hasil belajar. Untuk mengukur keberhasilan belajar mahasiswa atau dikenal dengan istilah Penilaian Acuan Patokan (PAP). PAP bisa digunakan bila dosen menggunakan tes seperti: tes prasyarat (*entry-behavior test*), tes awal (*pre test*), tes akhir (*post tes*), dan tes pengukur kemajuan (*progress test*); (2) kriteria test. Sebagai alat ukur dalam evaluasi, tes harus memiliki dua kriteria, yaitu validitas dan realibilitas; dan (3) jenis-jenis tes. Tes

⁷⁵ Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses.

⁷⁶ Suryobroto, *Proses Belajar...*, 53.

⁷⁷ Indah Komsiyah, *Belajar dan Pembelajaran*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 125.

⁷⁸ Suryobroto, *Proses Belajar...*, 44.

⁷⁹ Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses.

⁸⁰ Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran...*, 146

berdasarkan jumlah mahasiswa, ada tes kelompok atau tes individual. Sedangkan dari cara pelaksanaan, tes dapat dibedakan menjadi tes lisan, tes tulisan dan tes perbuatan.⁸¹

C. Penutup

Matakuliah Pendidikan Antikorupsi ini tidak berlandaskan pada salah satu perspektif keilmuan secara khusus. Berlandaskan pada fenomena permasalahan serta pendekatan budaya yang telah diuraikan diatas, matakuliah ini lebih menekankan pada pembangunan karakter antikorupsi (*anti-corruption character building*) pada diri individu mahasiswa. Mata kuliah Pendidikan antikorupsi yang dirumuskan Dirjen Dikti Kemendikbud lebih berorientasi berupa sebuah matakuliah yang berdiri sendiri (*independen*), yang diselenggarakan secara reguler dalam 14–16 pertemuan selama satu semester. Matakuliah ini dapat ditetapkan sebagai matakuliah yang bersifat wajib maupun pilihan di dalam kurikulum perdosenan tinggi. Tentu tidak menutup kemungkinan materi dan metode pembelajaran ini nantinya diterapkan juga pada bentuk-bentuk pendidikan diluar matakuliah independen. Materi Antikorupsi dapat disampaikan dalam satu atau beberapa pertemuan (insersi) dalam sebuah matakuliah tertentu, atau dalam bentuk pelatihan, kampanye, seminar dan sebagainya. Metode yang dipergunakan dapat disesuaikan dengan keterbatasan ruang, waktu dan kondisi.

Supaya matakuliah pendidikan antikorupsi berjalan dengan baik, maka dibutuhkan suatu manajemen pembelajaran. Menurut Terry, manajemen adalah proses, yakni aktifitas yang terdiri dari empat subyektivitas yang masing-masing merupakan fundamental. Keempat subyektivitas itu- yang ada dalam dunia manajemen dikenal sebagai P.O.A.C adalah *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), *controlling* (pengawasan). Oleh karena itu, implementasi manajemen pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi sangat berkaitan dengan empat unsur manajemen tersebut.

Berpijak dari konsep manajemen dan pembelajaran, maka konsep manajemen pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi dapat diartikan proses mengelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian (pengarahan) dan pengevaluasian kegiatan yang berkaitan dengan proses membelajarkan si pebelajar dengan mengikutsertakan berbagai faktor di dalamnya guna mencapai tujuan matakuliah pendidikan antikorupsi. Dalam “memanaje” atau mengelola pembelajaran, manajer dalam hal ini dosen melaksanakan berbagai langkah kegiatan mulai dari merencanakan pembelajaran, mengorganisasikan pembelajaran, mengarahkan dan mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan. Pengertian manajemen pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi dapat diartikan secara luas dalam arti mencakup keseluruhan kegiatan bagaimana membelajarkan mahasiswa mulai dari perencanaan pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi sampai pada penilaian pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi.

⁸¹ Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain*, 232-234

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Nurul. 2013. *Pendidikan Antikorupsi di Pesantren: Konsep Nilai dan Desain Pembelajaran*, (Bandung: Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM)).
- Bafadal, Ibrahim. 2004. *Manajemen Perlengkapan Lembaga pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Cahaya, Arifah. 2013. *Peta Korupsi Di Indonesia: Fakta dan Data terkait Korupsi di Indonesia*, Diambil Tanggal 20 Januari 2014 dalam <http://arifahcahaya11.blogspot.com/2013/03/peta-korupsi-di-indonesia.html>
- Effendy, Mochtar. 1986. *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Agama Islam*, Jakarta: PT. Bharata Karya Aksara.
- Griffin, R. 2006. *Business*, 8th Edition. NJ: Prentice Hall.
- Hamdani, Anwar. 2012. *Model Pendidikan Antikorupsi Bagi Siswa SLTA di Wilayah Kota Surakarta*, Makalah Penelitian.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Manajemen; Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hicks, Herbert and Ray Gullett, C. 1981. *Organization: Theory and Behavior*, London: Mc Graw Hill.
- Kemendikbud. 2011. *Pendidikan Antikorupsi untuk Per dosenan Tinggi*, Jakarta, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Badan Hukum Kepegawaian.
- Kementerian Agama. 2013. *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah*, Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- . Pedoman Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Per dosenan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2013*, Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- Ki Supriyoko. 2006. *Peran Pendidikan dalam Mencegah Timbulnya Mental Korupsi Anak Bangsa Indonesia*, dalam Buku, "Agama sebagai Kritik Sosial di Tengah Arus Kapitalisme Global", Ed. Moh. Asror Yusuf, Yogyakarta: IRCISoD.
- Koentjoroningrat. 1938. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia.
- KPK. *Tt. Pahami Dulu Baru Lawan: Buku Saku Mengenal Korupsi*, (Jakarta: KPK.
- Kurdi, Syeb dan Abdul Aziz. 2006. *Model Pembelajaran Efektif Pendidikan Agama Islam di SD dan MI*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Madany, A. Malik. 2007. "Korupsi Sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Islam", dalam artikel di www.nu-anti-korupsi.or.id, diakses pada 5 Maret 2007.
- Majid, Abdul. 2005. *Perencanaan Pembelajaran : Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Makmun, Abin Syamsudin. 2010. *Pengelolaan Pendidikan*, Bandung: Pustaka Eduka.
- Mannulang. 1976. *Dasar-dasar Mangemen*, Jakarta: Ghalia.
- Manzini, E. 1996. *Sustainable Product Services Development; Workshop Organized by UNEP-WG-SPD en Pioneer industries on Sustainable Services*, Amsterdam: In The INNES Conference challenge of Sustainable Development.
- Mulyasa, E. 2002. *Manajemen Berbasis Lembaga pendidikan, Konse Strategi, dan Implementasi*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- . 2006. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawir, Ahmad Warson. 1884. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Ponpes Krpyak al-Munawwir, 1884.
- Nazarudin. 2007. *Manajemen Pembelajaran: Implementasi Konsep, Karakteristik dan Metodologi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum*, Yogyakarta: Teras.
- Nurdin, Muhamad. 2014. *Pendidikan Antikorupsi: Strategi Internalisasi Nilai-nilai Islami dalam Menumbuhkan Kesadaran Antikorupsi di Lembaga pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Plunkett, Warren R., dkk. 2005. *Management: Meeting and Exceeding Customer Expectations*. 8 Edition. USA: Thomson South-Western Co.
- Sagala, Syaiful. 2010. *Konsep dan Makna Pembelajaran*, Bandung: Alfabeta.
- Sanjaya, Wina. 2011. *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, Cet 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sumiarti. 2007. *Pendidikan Antikorupsi*, P3M STAIN Purwokerto: INSANIA, Vol. 12, No. 2, 8 Mei-Ags 2007.
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-prinsip Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
- Undang Uundang No. 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- Wahab, Abdul. 1999. *Menulis Karya Ilmiah* Surabaya: Airlangga University Press.
- Wibowo, Agus. 2012. *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.